

PERAN GURU PKn DALAM PENDIDIKAN KARAKTER

Cholisin : Staf Pengajar PKn & Hukum FISE UNY

Disampaikan pada Kuliah Umum Jurusan PPKn FKIP UAD Yogyakarta, 5 Februari 2011

MENGAPA PENDIDIKAN KARAKTER PENTING ?

Dalam pertimbangan tentang perlunya kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa didasarkan adanya permasalahan yang sedang dihadapi bangsa saat ini yaitu : (1) disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa. (2) Keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila. (3) Bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (4) Memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. (5) Ancaman disintegrasi bangsa. (6) Melemahnya kemandirian bangsa¹. Dengan kata lain seperti dikatakan Gumilar Rusliwa Somantri, kita sedang tengah mengalami anomie atau “kekosongan” *Grundnorm* yang menjadi rujukan berdirinya negara bangsa yang tunggal dan sumber dari berbagai tata aturan. Anomie terjadi karena Pancasila yang sejak kemerdekaan menjadi norma dasar, ikut terpuruk bersama jatuhnya rezim Orde Baru”²

Masalah di atas, tampaknya merupakan persoalan lama yang belum terpecahkan. Koentjaraningrat (1974) dalam *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, menyatakan sedikitnya ada lima mentalitas negatif bangsa Indonesia: (1) meremehkan mutu; (2) cenderung mencari jalan pintas (menerabas) (misalnya. : main belakang, orang dalam, semua bisa diatur, satu meja satu amplop, urusan diselesaikan dengan damai,pen.); (3) tidak percaya diri; (4) tidak berdisiplin (misalnya.: jam karet, vonis dapat ditentukan di belakang meja, membuang sampah sembarangan, lebih takut kepada polisi daripada kepada peraturan, terlambat dalam mengerjakan banyak hal, tawuran, sidang pleno di DPR tak pernah lengkap,pen.); dan (5) mengabaikan tanggung jawab (misalnya. : tidak amanah, khianat, korupsi massal, penyalahgunaan kekuasaan,pen.). Sedangkan Muchtar Lubis (1986) menyatakan bahwa ciri negatif manusia Indonesia: (1) hipokritis alias munafik; (2) segan dan enggan bertanggung jawab; (3) berjiwa feodal; (4) masih percaya takhyul; (5) artistik; (6) memiliki watak yang lemah; (7) bukan *economic animal*;

Belum terpecahkannya masalah karakter, menjadikan Indonesia belum beranjak mencapai kemajuan yang mensejahterakan rakyat. Sebagai bangsa yang pernah dijajah negara kapitalis – imperialis yang menindas dan menyengsarakan justru Indonesia tidak mampu keluar dari sistem ekonomi kapitalis yang tidak berkeadilan ini.³ Ekonomi Pancasila

¹ Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010 – 2025, Pemerintah Republik Indonesia, 2010, halaman v.

² Gumilar Rusliwa Somantri,2006. Pancasila dalam Perubahan Sosial-Politik Indonesia Modern, dalam *Restorasi Pancasila : Mendamaikan politik Identitas dan Modernitas*, Prosiding Simposium Peringatan Hari Lahirnya Pancasila, Kampus FISIP UI, Depok 31 Mei 2006, halaman 34.

³ Bangsa Indonesia dipaksa untuk memenuhi tiga syarat ekonomi guna memperoleh pengakuan kedaulatan dalam forum KMB pada 1949. Ketiga syarat ekonomi itu adalah: (1) bersedia menerima warisan utang Hindia Belanda sebesar 4,3 milliard gulden; (2) bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh IMF; dan (3) bersedia mempertahankan keberadaan perusahaan-perusahaan

(Ekonomi Kerakyatan) yang memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan keadilan sosial yang secara tegas ditentukan pasal 33 UUD 1945, justru tidak dijalankan. Ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan diri, kemandirian dan nasionalisme yang sangat rendah. Kesalahan inilah yang dapat menjerumuskan Indonesia, seperti yang ditakutkan Sukarno, “*menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa.*” Bahkan, mungkin yang lebih buruk lagi dari kekuatiran Sukarno, “*menjadi bangsa pengemis dan pengemis di antara bangsa-bangsa.*”⁴ ISSP (International Social Survey Programme) yang berbasis di Norwegia pada tahun 1995 (melibatkan 23 negara) dan 2003 (melibatkan 34 negara) menunjukkan terdapat korelasi positif antara semangat kebangsaan dan tingkat kemakmuran sebuah bangsa.

Sistem ekonomi kapitalis (neo-liberalisme) memberikan lahan yang subur bagi berkembangnya pragmatisme, individualisme dan materialisme. Hal ini berdampak pada berkembangnya sikap dan perilaku politik transaksional dan kartel. Sikap dan perilaku politik yang demikian, politik dijadikan komoditas untuk memperoleh keuntungan kekuasaan dan material yang sebesar-besarnya bagi diri dan kelompoknya. Kemudian ketika ada penyimpangan yang dilakukan diantara mereka, diatasi dengan cara saling menutupi.

Sesungguhnya kita dalam kondisi krisis ekonomi dan politik, karena berbagai kebijakan publik yang ada belum memberikan tanda-tanda memprioritaskan untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata. Misalnya, hal ini dapat digambarkan hal-hal berikut:

1. Proses transisi mennggambarkan semakin terperosok perekonomian Indonesia ke dalam penyelenggaraan agenda-agenda ekonomi neoliberal dalam beberapa waktu belakangan ini. Bahkan, utang dalam dan luar negeri pemerintah yang pada akhir pemerintahan Soeharto berjumlah US\$54 milyar, belakangan membengkak menjadi US\$165 milyar.⁵
2. 230 Juta penduduk hanya menikmati 5% dari pendapatan nasional bruto. Sedangkan 40 orang terkaya di Indonesia menguasai 60% pendapatan nasional bruto (Kompas, 15 Desember 2010).
3. Yang paling menderita dari gejolak harga komoditas adalah penduduk miskin karena bobot harga komoditas mencapai 74 % dalam perhitungan garis kemiskinan (Faisal Basri, Harga Komoditas dan Inflasi, Kompas, 10 Januari 2011, p.15). Klaim angka kemiskinan pemerintahan SBY 31 juta. Hendri Saporini, membuat perhitungan demikian, jika digunakan penduduk yang layak menerima raskin tahun 2010 jumlahnya 70 juta orang. Apabila digunakan yang berhak menerima Jamkesmas jumlahnya 76, 4 juta orang. Sedangkan data Bank Dunia mendekati 100 juta orang (42%) (Hendri Saporini, Si Miskin Harus Bekerja, Kompas, 10 Jan 2011).

asing yang beroperasi di Indonesia. Lihat, Revrison Baswir.2009, Ekonomi Kerakyatan Vs Neoliberalisme, Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM.

⁴ Hubungan Indonesia dengan organisasi donor (IMF, CGI, World Bank, ADB) dan negara-negara pemberi pinjaman (AS, Jepang, EU), sudah mendekati hubungan antara “pengemis-pemberi sedekah.” Sikap dan perilaku demikian ini sangat bertentangan dengan gagasan dasar berdirinya Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sikap ketergantungan yang terus-menerus atas bantuan asing (*foreign assistance*) sangat bertentangan dengan konsep awal “*nation and character building*”. Lihat, Otho H. Hadi, MA (Staf Direktorat Politik, Komunikasi, dan Informasi Bappenas). *Nation and Character Building Melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan*. Tulisan ini disusun dari hasil diskusi reguler Direktorat Politik, Komunikasi, dan Informasi Bappenas-red., www.gogle.com/otto-2000910150958/ diunduh, 10 Januari 2011, halaman 2-3

⁵ Lihat, Revrison Baswir.2009, Ekonomi Kerakyatan Vs Neoliberalisme, Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM

4. Angka kelahiran yang sangat tinggi, setiap tahun ada sekitar 4,5 juta bayi lahir. Ini membutuhkan kerja keras bangsa ini menyediakan kebutuhan dasarnya (pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan).

PKn SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER

Karakter adalah nilai-nilai yang melandasi perilaku manusia berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum/konstitusi, adat istiadat, dan estetika. **Pendidikan karakter** adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku (karakter) kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi insan kamil.⁶ **Karakter Bangsa** adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas-baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang khas-baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*, dan komitmen terhadap NKRI.⁷ Pendidikan karakter rakyat menurut Bung Hatta, adalah: mandiri, tahu hak dan kewajiban, mau mengambil tanggung jawab.⁸

PKn sebagai pendidikan karakter merupakan salah satu misi yang harus diemban. Misi lain adalah sebagai pendidikan politik/pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan HAM, dan bahkan sebagai pendidikan anti korupsi. Dibandingkan dengan mata pelajaran lain, mata pelajaran PKn dan Agama memiliki posisi sebagai ujung tombak dalam pendidikan karakter. Maksudnya dalam kedua mata pelajaran tersebut pendidikan karakter harus menjadi tujuan pembelajaran. Perubahan karakter peserta didik merupakan usaha yang disengaja/direncanakan (*instructional effect*), bukan sekedar dampak ikutan/pengiring (*nurturant effect*).⁹ Hal ini dapat ditunjukkan bahwa komponen PKn adalah pengetahuan, ketrampilan dan **karakter kewarganegaraan**.

Dengan kata lain tanpa ada kebijakan pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam berbagai mata pelajaran, PKn harus mengembangkan pendidikan karakter. Lebih-lebih dengan adanya kebijakan pengembangan pendidikan karakter yang terintegrasi, ini merupakan tantangan untuk menunjukkan bahwa PKn sebagai ujung tombak yang tajam bukan tumpul bagi pendidikan karakter.

PKn sebagai pendidikan karakter dapat dikenali dari konsep, tujuan, fungsi, tuntutan kualifikasi dan keunikan PKn.. PKn (*Civic Education*) adalah pembelajaran yang mengugah rasa ingin tahu dan kepercayaan (*trust*) terhadap norma – norma sosial yang mengatur hubungan personal dalam masyarakat sebagaimana mengatur partisipasi politik.¹⁰ PKn “merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi

⁶ Tim Pendidikan Karakter .2010. Pendidikan Karakter Di Smpkementerian Pendidikan Nasional Ditjen Mandikdasmen Direktorat Pembinaan SMP 2010, halaman 11.

⁷ Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa, halaman 7

⁸ Rikard Bagun.2002. Seratus Tahun Bung Hatta, halaman xix.

⁹ Draf Panduan Guru Mata pelajaran PKn : Pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan Nasional, 2010, halaman....11

¹⁰ Lihat Susan Hunter & Rivhard A Birisbin Jr. ,2001.,Departemen of Political Science West Virginia University, “Civic and Political Education in Political Science A Survey of Practices”, Prepared for presentation at the Annual Meeting of APSA , Boston, MA.

warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan **berkarakter** yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945” (BSNP, Standar Isi).

Tujuan PKn adalah agar peserta didik memiliki kemampuan:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan **karakter-karakter** masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (BSNP, Standar Isi).

Fungsi PKn adalah wahana untuk membentuk warga negara cerdas, terampil, dan **berkarakter** yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 (Direktorat P-SMP).

Sedangkan kompetensi guru PKn yang bersifat khusus: (Permendiknas No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru) meliputi:

1. Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran P Kn.
2. Memahami substansi PKn yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*).
3. Menunjukkan manfaat mata pelajaran PKn.

Keunikan PKn digambarkan John Potter¹¹, dalam *Citizenship Education* substansinya berisikan tentang hak – hak kita, tetapi harus diakui memiliki tiga keunikan yang membedakannya dengan mata pelajaran lain, (1) *Linked with other subject*, maksudnya sekolah harus mendukung secara eksplisit untuk mengkaitkan PKn dengan mata pelajaran yang lain; (2) *A way of life*, maksudnya PKn harus mengakar dalam pandangan hidup dan etos sekolah secara keseluruhan; dan (3) *Participation*, maksudnya PKn memerlukan generasi muda (*young people*) untuk belajar melalui partisipasi dan pengalaman nyata.

KARAKTER WARGA NEGARA SEBAGAI SALAH SATU KOMPONEN SUBSTANSI PKn

Komponen substansi PKn meliputi: pengetahuan kewarganegaraan, ketrampilan kewarganegaraan dan karakter kewarganegaraan. Dengan demikian PKn telah memiliki kawasan pembelajaran sendiri yang khas. Hal ini disebabkan dalam taksonomi Bloom, karakter merupakan aspek afektif, padahal karakter tidak hanya memiliki dimensi sikap tetapi juga perilaku/tindakan yang telah menjadi watak/perilaku sehari-hari. Begitu pula ketrampilan kewarganegaraan yang pada intinya merupakan ketrampilan partisipasi /ketrampilan sosial (dalam versi CCE termasuk di dalamnya ketrampilan intelektual), tidak terdapat dalam taksonomi Bloom. Hal inilah yang merupakan latar belakang mengapa PKn harus memiliki kawasan pembelajaran yang merupakan komponen substansi PKn.

Komponen PKn menurut Direktorat P-SMP dapat dilihat pada Tabel 1, berikut ini.

¹¹ John Potter “The challenge of education for active citizenship”, *Education + Training*, Volume 44- Number 2 -2002- p. 57 – 66 :

Tabel 1. Komponen PKn

PENGETAHUAN KEWARGANEGARAAN	KETERAMPILAN KEWARGANEGARAAN	KARAKTER KEWARGANEGAR
<ul style="list-style-type: none"> • memahami tujuan pemerintahan dan prinsip-prinsip dasar konstitusi pemerintahan republik Indonesia • mengetahui struktur, fungsi dan tugas pemerintahan daerah dan nasional serta bagaimana keterlibatan warga negara membentuk kebijakan publik • mengetahui hubungan negara dan bangsa Indonesia dengan negara-negara dan bangsa-bangsa lain beserta masalah-masalah dunia dan/atau internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • mengambil atau menetapkan keputusan yang tepat melalui proses pemecahan masalah dan inkuiri • mengevaluasi kekuatan dan kelemahan suatu isu tertentu • menentukan atau mengambil sikap guna mencapai suatu posisi tertentu • membela atau mempertahankan posisi dengan mengemukakan argumen yang kritis, logis dan rasional • memaparkan suatu informasi yang penting kepada khalayak umum • membangun koalisi, kompromi, negoisasi dan consensus. 	<ul style="list-style-type: none"> • memberdayakan dirinya sebagai warganegara yang independen, aktif, kritis, well-informed, dan bertanggungjawab untuk berpartisipasi secara efektif dan efisien dalam berbagai aktivitas masyarakat, politik, dan pemerintahan pada semua tingkatan (daerah dan nasional). • Memahami bagaimana warganegara melaksanakan peranan, hak dan tanggung jawab personal untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat pada semua tingkatan (daerah dan nasional). • Memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai budi pekerti, demokrasi, hak asasi manusia dan nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara • Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Sumber : Pendidikan Kewarganegaraan: Bahan Sosialisasi Dalam Pelaksanaan Kurikulum Satuan Pendidikan Oleh: Tim Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 2006

Ketrampilan dan karakter kewarganegaraan menurut CCE (Center for Civic Education) dapat dilihat pada Tabel 2, 3, dan 4 berikut ini.

Tabel 2. Ketrampilan Kewarganegaraan : Komponen Ketrampilan Intelektual

UNSUR KETRAMPILAN INTELEKTUAL WARGA NEGARA
<p>1. Mengidentifikasi (menandai/menunjukkan) dibedakan menjadi ketrampilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • membedakan; • mengelompokkan/mengklasifikasikan • menentukan bahwa sesuatu itu asli.
<p>2. Menggambarkan (memberikan uraian / ilustrasi), misalnya tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • proses;

<ul style="list-style-type: none"> • lembaga; • fungsi; • alat; • tujuan; • kualitas;
<p>3.Menjelaskan (mengklarifikasi / menafsirkan), misalnya tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa; • makna dan pentingnya peristiwa atau ide; • alasan bertindak;
<p>4.Menganalisis, misalnya tentang kemampuan menguraikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • unsur – unsur atau komponen-komponen ide (gagasan), proses politik, institusi-institusi; • konsekuensi dari ide, proses politik, institusi – institusi; • memilah mana yang merupakan cara dengan tujuan, mana yang merupakan fakta dan pendapat; mana yang merupakan tanggungjawab pribadi dan mana yang merupakan tanggungjawab publik.
<p>5.Menjelaskan (mengklarifikasi / menafsirkan), misalnya tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa; • makna dan pentingnya peristiwa atau ide; • alasan bertindak;
<p>7.Mengevaluasi pendapat/posisi : menggunakan kriteria/standar untuk membuat keputusan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kekuatan dan kelemahan isue / pendapat; • menciptakan pendapat baru.
<p>8.Mengambil pendapat/posisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • dari hasil seleksi berbagai posisi; • membuat pilihan baru;
<p>9.Mempertahankan pendapat/posisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengemukakan argumentasi berdasarkan asumsi atas posisi yang dipertahankan /diambil / dibela; • merespons posisi yang tidak disepakati.

Sumber : Diolah dari Center for Civic Education (1994). *National Standard for Civics and Government*, p. 1-5.

Sedangkan ketrampilan kewarganegaraan komponen ketrampilan partisipasi warga negara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Ketrampilan Kewarganegaraan : Komponen Ketrampilan Partisipasi

UNSUR KETRAMPILAN PARTISIPASI WARGA NEGARA
<p>1.Berinteraksi (termasuk berkomunikasi tentunya) terhadap obyek yang berkaitan dengan masalah – masalah publik, yang termasuk dalam ketrampilan ini, al.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bertanya, menjawab, berdiskusi dengan sopan santun;

- menjelaskan artikulasi kepentingan;
- membangun koalisi, negoisasi, kompromi
- mengelola konflik secara damai;
- mencari konsensus.

2. Memantau/memonitor masalah politik dan pemerintahan terutama dalam penanganan persoalan-persoalan publik ,yang termasuk ketrampilan ini al. :

- menggunakan berbagai sumber informasi seperti perpustakaan, surat kabar, tv, dll untuk mengetahui persoalan-persoalan publik;
- upaya mendapatkan informasi tentang persoalan publik dari kelompok – kelompok kepentingan, pejabat pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah. Misalnya dengan cara menghadiri berbagai pertemuan publik seperti : pertemuan organisasi siswa, komite sekolah, dewan sekolah, pertemuan desa/BPD, pertemuan wali kota, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

3. Mempengaruhi proses politik, pemerintah baik secara formal maupun informal, yang termasuk ketrampilan ini al.:

- melakukan simulasi tentang kegiatan : kampanye, pemilu, dengar pendapat di DPR/DPRD, pertemuan wali kota, lobby, peradilan;
- memberikan suara dalam suatu pemilihan;
- membuat petisi;
- melakukan pembicaraan/memberi kesaksian di hadapan lembaga publik;
- bergabung atau bekerja dalam lembaga advokasi untuk memperjuangkan tujuan bersama atau pihak lain;
- meminta atau menyediakan diri untuk menduduki jabatan tertentu.

Sumber : Diolah dari Center for Civic Education (1994). *National Standard for Civics and Government*, p. 127-135.

Karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*), merupakan watak atau sifat – sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri. Karakter kewarganegaraan mencakup karakter privat (pribadi) dan karakter publik (kemasyarakatan) yang utama meliputi :

Tabel 4. Komponen Karakter Kewarganegaraan

1. Menjadi anggota masyarakat yang independen (mandiri).

Karakter ini merupakan kepatuhan secara suka rela terhadap peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab atas segala konsekuensi yang timbul dari perbuatannya serta menerima kewajiban moral dan legal dalam masyarakat demokratis.

2. Memenuhi tanggungjawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik.

Yang termasuk karakter ini, al. :

- mengurus diri sendiri;
- memberi nafkah /menopang keluarga;
- merawat , mengurus dan mendidik anak;
- mengikuti informasi tentang issue-issue publik;
- memberikan suara (*voting*);
- membayar pajak;
- menjadi saksi di pengadilan;

- memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- melakukan tugas kepemimpinan sesuai dengan bakat dan kemampuan sendiri/masing-masing.

3. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu.

Yang termasuk karakter ini, al. :

- mendengarkan pendapat orang lain;
- berperilaku santun (bersikap sopan);
- menghargai hak dan kepentingan sesama warganegara;
- mematuhi prinsip aturan mayoritas, namun tetap menghargai hak minoritas untuk berbeda pendapat.

4. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara bijaksana dan efektif.

Karakter ini menghendaki pemilikan informasi yang luas sebelum memberikan suara (*voting*) atau berpartisipasi dalam debat publik, keterlibatan dalam diskusi yang santun dan serius, dan memegang kendali kepemimpinan yang sesuai. Juga menghendaki kemampuan membuat evaluasi kapan saatnya kepentingan pribadi sebagai warga negara dikesampingkan demi kepentingan umum dan kapan seseorang karena kewajibannya atau prinsip-prinsip konstitusional untuk menolak tuntutan-tuntutan kewarganegaraan tertentu. Sifat – sifat warganegara yang dapat menunjang karakter berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan (publik) diantaranya:

- **Keberadaban** (*civility*), yang termasuk sifat ini al. : menghormati orang lain; menghormati pendapat orang lain meskipun tidak sepaham; mendengarkan pandangan orang lain; menghindari argumentasi yang bermusuhan, sewenang-wenang, emosional dan tidak masuk akal;
- **Menghormati hak – hak orang lain**, yang termasuk sifat ini al. : menghormati hak orang lain bahwa mereka memiliki suara yang sama dalam pemerintahan dan sama di mata hukum; menghormati hak orang lain untuk memegang dan menganjurkan gagasan yang bermacam dan bekerjasama dalam suatu asosiasi untuk memajukan pandangan-pandangan mereka.
- **Menghormati hukum**, yang termasuk sifat ini al.: berkemauan mematuhi hukum, bahkan ketika ia tidak menyepakatinya; berkemauan melakukan tindakan dengan cara-cara damai dan legal untuk mengubah hukum yang tidak arif dan adil;
- **Jujur** : berkemauan untuk memelihara dan mengekspresikan kebenaran.
- **Berpikiran terbuka** : yaitu mempertimbangkan pandangan orang lain.
- **Berpikir kritis** : yaitu kehendak hati untuk mempertanyakan keabsahan/kebenaran berbagai macam posisi termasuk posisi dirinya.
- **Bersedia melakukan negosiasi dan berkompromi** : yaitu kesediaan untuk membuat kesepakatan dengan orang lain meskipun terdapat perbedaan yang sangat tajam/mendalam, sejauh hal itu dinilai rasional dan adanya pembenaran secara moral untuk melakukannya.
- **Ulet / tidak mudah putus asa** : yaitu kemauan untuk mencoba berulang-ulang untuk meraih suatu tujuan.
- **Berpikiran kewarganegaraan** : yaitu memiliki perhatian dan kepedulian terhadap urusan – urusan publik/kemasyarakatan.
- **Keharuan/memiliki perasaan kasihan** : yaitu mempunyai kepedulian agar orang lain hidupnya lebih baik, khususnya terhadap mereka yang tidak beruntung.
- **Patriotisme** : memiliki loyalitas terhadap nilai – nilai demokrasi konstitusional.
- **Keteguhanhati**: kuat untuk tetap pada pendiriannya, ketika kata hati menuntutnya.
- **Toleran terhadap ketidak pastian**: yaitu kemampuan untuk menerima ketidak pastian

yang muncul, karena ketidak cukupan pengetahuan atau pemahaman tentang isu-isu yang kompleks atau tentang ketegangan antara nilai-nilai fondamental dengan prinsip-prinsip.

5. Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat.

Karakter ini mengarahkan warganegara agar bekerja dengan cara-cara damai dan legal dalam rangka mengubah undang-undang yang dianggap tidak adil dan bijaksana. Yang termasuk dalam karakter ini, al. :

- sadar informasi dan kepekaan terhadap urusan-urusan publik;
- melakukan penelaahan terhadap nilai-nilai dan prinsip – prinsip konstitusional;
- memonitor keputusan para pemimpin politik dan lembaga-lembaga publik dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat kekurangannya.

Sumber : Diolah dari Center for Civic Education (1994). *National Standard for Civics and Government*, p. 127-135.

Dewasa ini Direktorat P-SMP telah berhasil mengidentifikasi nilai-nilai karakter utama dan pokok untuk Mata Pelajaran PKn, sebagai berikut.

Tabel 5. Nilai Karakter Utama dan Pokok PKn

<p>1. Religius Pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan/atau ajaran agamanya.</p>
<p>2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri dan pihak lain. Atau berkemauan untuk memelihara dan mengekspresikan kebenaran.</p>
<p>3. Cerdas Pikiran dan perilaku yang berupa reaksi yang cepat dan akurat terhadap pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap dipakai apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi baru.</p>
<p>4. Tangguh Sikap dan perilaku pantang menyerah /tidak mudah putus asa dalam menghadapi berbagai kesulitan dalam melaksanakan kegiatan atau tugas sehingga mampu mengatasi dan berhasil meraih tujuan yang menjadi tugasnya atau yang diinginkannya. Juga kuat terhadap pendiriannya, ketika kata hati menuntutnya.</p>
<p>5. Demokratis Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain baik dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial.</p>
<p>6. Peduli Sikap dan perilaku yang berupa perhatian (simpati, empati) dan memberikan kesediaan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan kepada orang lain atau kelompok agar kehidupannya lebih baik, khususnya bagi mereka yang tidak beruntung atau menghadapi masalah-masalah publik (kelaparan, kekuarangan air minum, korban pelanggaran HAM, pencemaran lingkungan,dsb.)</p>

<p>7. Nasionalis Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya. Dalam nasionalisme berarti ada pengahayatan dan kepedulian serta turut bertanggung jawab atas semua masalah Negara – Bangsa; dengan perkataan lain, memperlakukan dan menyikapi suka duka kolektif (nasional) sebagai keprihatinan pribadi (individual), dan siap sedia membela Negara – Bangsa.</p>
<p>8. Patuh pada aturan sosial, Sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum.</p>
<p>9. Menghargai keberagaman, Sikap memberikan respek/hormat terhadap berbagai macam hal baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku, dan agama.</p>
<p>11. Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik/hak diri sendiri dan orang lain serta tugas/kewajiban diri sendiri serta orang lain. Mencakup dalam pengetahuan ini menghormati hak orang lain bahwa mereka memiliki kedudukan yang sama dalam pemerintahan (untuk posisi memerintah dan posisi diperintah) dan sama di mata hukum (<i>equality before the law</i>) , dan dalam kemerdekaan mengeluarkan pendapat.</p>
<p>12. Bertanggung jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan YME.</p>
<p>13. Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif Berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki.</p>
<p>14. Kemandirian Sikap dan perilaku tidak mudah tergantung pada orang lain dan melaksanakan kegiatan atas dasar kemampuan sendiri.</p>

Sumber : Draf Panduan Guru Mata pelajaran PKn : Pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan Nasional, 2010.

NILAI-NILAI KARAKTER UNTUK MATA PELAJARAN PKN

Nilai-nilai karakter untuk Mata Pelajaran PKn meliputi nilai karakter pokok dan nilai karakter utama. nilai karakter pokok mata pelajaran PKn yaitu : kereligiusan, , kejujuran, kecerdasan , ketangguhan, kedemokratisan, dan kepedulian. sedangkan nilai karakter utama mata pelajaran PKn yaitu : nasionalis, kepatuhan pada aturan sosial, menghargai keberagaman, kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, bertanggung jawab,

berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, dan kemandirian.¹²Nilai-nilai karakter utama ini dapat dikembangkan lebih luas, untuk upaya memperkokoh fungsi pkn sebagai pendidikan karakter.

Berikut ini disajikan nilai – nilai karakter utama dan pokok beserta indikatornya.

Tabel 6. Nilai karakter dan indikatornya

NO	KARAKTER	INDIKATOR
1	Kereligiusan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan senyum, sapa, salam, sopan dan santun. b. Berdoa setiap mengawali dan mengakhiri kegiatan/melaksanakan tugas; c. Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit pada awal pelajaran. d. Mengembangkan toleransi beragama e. Melaksanakan ibadah dengan baik. f. Menghotmati orang yang sedang melaksanakan ibadah g. Menolak setiap sikap, tindakan dan kebijakan yang menyimpang atau menodai agama.
2	Kejujuran	<ul style="list-style-type: none"> a. Menepati janji b. Berkata dan bertindak secara benar sesuai dengan fakta/tidak berbohong; c. Bekerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki. d. Berkemauan untuk memelihara dan mengekspresikan kebenaran.
3	Kecerdasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Berkata dan bertindak secara benar, cepat, dan akurat. b. Mampu menerapkan pengetahuannya terhdap hal-hal yang baru
4	Ketangguhan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sikap dan perilaku pantang menyerah /tidak mudah putus asa. b. Mampu mengatasi permasalahan dan kesulitan sehingga berhasil meraih tujuan atau cita-citanya.
5	Kedemokratisan	<ul style="list-style-type: none"> a. menghormati pendapat dan hak orang lain b. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain c. melaksanakan musyawarah dalam mengambil keputusan. d. mengusahakan musyawarah untuk mencapai mufakat e. menerima dan melaksanakan hasil keputusan

¹² Draf Panduan Guru Mata pelajaran PKn , halaman 13

		<p>musyawarah.</p> <p>f. keputusan musyawarah dapat dipertanggungjawabkan secara moral.</p> <p>g. menerima kekalahan dalam kompetisi yang jujur dan adil</p> <p>h. berpikir terbuka (mau menerima ide baru atau pendapat orang lain walaupun berbeda),</p> <p>i. emosinya terkendali(misalnya: menghindari argumentasi yang bermusuhan, sewenang-wenang dan tidak masuk akal),</p> <p>j. berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah-masalah publik (termasuk aktif dalam kegiatan sekolah, memberikan masukan dalam pembuatan peraturan kelas, peraturan sekolah, peraturan desa)</p> <p>k. menyasikan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum.</p>
6	Kepedulian	<p>a. Memelihara kebersihan, keindahan, dan kelestarian alam</p> <p>b. Memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan terhadap orang lain yang dilanda musibah atau kurang beruntung dalam kehidupannya;</p> <p>c. Tidak bersifat masa bodoh terhadap perubahan atau keadaan lingkungan.</p>
7	Nasionalisme	<p>a. Berbahasa Indonesia secara baik dan benar.</p> <p>b. Memiliki rasa cinta tanah air (menghormati pahlawan, melakukan upacara bendera, memperingati hari-hari besar nasional, menyanyikan lagu-lagu kebangsaan; melakukan kegiatan pelestarian lingkungan, dsb.)</p> <p>c. Setia kawan terhadap sesama anak bangsa ;</p> <p>d. Menggunakan produksi dalam negeri.</p> <p>e. Mengutamakan persatuan dan kesatuan, kepentingan bangsa dan negara.</p> <p>f. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai dan budaya daerah maupun nasional (misalnya: memakai pakaian tradisional, menyanyikan lagu-lagu daerah dsb.)</p> <p>g. Memelihara dan mengembangkan pilar-pilar kenegaraan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika (misalnya, memasang bendera merah putih; aktif terlibat dalam setiap kegiatan peringatan, pemasyarakatan dan penegakan pilar-pilar kenegaraan tersebut).</p>

8	Kepatuhan pada aturan sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. mematuhi tata tertib sekolah. b. mematuhi norma, kebiasaan, adat dan peraturan yang berlaku c. tidak berbuat sewenang-wenang, anarkhis, main hakim sendiri atau melakukan tindakan diluar ketentuan
9	Menghargai keberagaman	<ul style="list-style-type: none"> a. Saling menghormati dan bekerjasama walaupun adanya perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). b. Tidak memilih-milih teman dalam pergaulan. c. Menghargai hasil karya atau produk suku lain, dengan cara mengapresiasi, mengkoleksi, memakai , menyanyikan;
10	Kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain	<ul style="list-style-type: none"> a. Bersikap dan bertindak adil b. Belajar dengan tekun dan disiplin c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. d. Menghargai hak-hak orang lain. e. Melaksanakan kewajiban dengan baik.
11	Bertanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan tugas/pekerjaan rumah dengan baik dan tepat waktu. b. Berani menanggung resiko atau akibat dari segala perbuatannya c. Melakukan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. d. Bersedia meminta maaf jika bersalah, dan berusaha tidak mengulangi lagi perbuatannya. e. Bersedia mengundurkan diri karena gagal dalam melaksanakan tugas, jika hal itu merupakan jalan keluar yang terbaik bagi kepentingan umum. f. Bersedia dikenai sanksi hukum yang berlaku apabila telah terbukti melanggar peraturan.
12	Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengemukakan/mengusulkan sesuatu yang masuk akal dengan menggunakan akal yang sehat dan hati nurani yang luhur. b. Memberikan masukan yang bersifat membangun c. Memberikan ide atau gagasan yang baik untuk kepentingan umum d. Memaparkan pendapat didasarkan pada fakta empirik;
13	Kemandirian	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak mudah tergantung kepada orang lain; b. Melaksanakan kegiatan atas dasar kemampuan sendiri;

Sumber : Draf Panduan Guru Mata pelajaran PKn : Pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama, 2010.

PERAN GURU PKn DALAM MENGEMBANGKAN KARAKTER PESERTA DIDIK

Fasli Jalal, Dirjen Dikti (sekarang Wakil Mendiknas) menyatakan bahwa tantangan terbesar adalah peningkatan mutu pendidikan, terutama penyediaan tenaga **guru berkualitas dan profesional**. Persoalan lain adalah angka partisipasi di sekolah menengah dan pendidikan tinggi yang masih rendah.¹³ Pernyataan ini perlu direspon oleh LPTK dan guru untuk senantiasa meningkatkan kerja keras bagaimana menyiapkan guru atau menjadi guru yang kreatif, inovatif dan efektif. Karakter guru yang demikian, tidak mudah ditemukan.

Dalam kaitan peran guru PKn dalam pembangunan karakter bangsa, porsi peran dominannya ada pada strategi pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan. Strategi Pembangunan Karakter Bangsa dapat dilakukan melalui sosialisasi, pendidikan, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerjasama¹⁴ **Strategi Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Sosialisasi** sebagai usaha sadar dan terencana untuk membangkitkan kesadaran dan sikap positif terhadap pembangunan karakter bangsa guna mewujudkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. **Strategi Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan** dimaksudkan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi dan/atau kelompok yang unik-baik sebagai warga negara. Hal itu diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. **Strategi Pembangunan Karakter Bangsa melalui Pemberdayaan** merupakan salah satu strategi pembangunan karakter bangsa yang diarahkan untuk memampukan para pemangku kepentingan dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan karakter. **Strategi Pembangunan Karakter Bangsa melalui Pembudayaan** dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, partai politik, dan media massa. Strategi pembudayaan menyangkut pelestarian, pembiasaan, dan pemantapan nilai-nilai baik guna meningkatkan martabat sebuah bangsa. Strategi tersebut dapat berwujud pemodelan, penghargaan, pengidolaan, fasilitasi, serta hadiah dan hukuman. **Strategi Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Kerjasama** Pada dasarnya, kunci akhir sebuah strategi ada pada kerjasama dan koordinasi. Berbagai kerjasama dan koordinasi dapat dilakukan antarwarga negara, antarkelompok, antarlembaga, antardaerah, dan bahkan antarnegara.

Sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas bahwa salah satu misi PKn adalah sebagai pendidikan karakter, maka ada beberapa peran guru PKn yang perlu dilakukan dalam mengembangkan misi tersebut.

1. Memahami nilai-nilai karakter yang hendak dikembangkan

¹³ “Pendidikan Tanpa Revolusi Bisa Terpuruk, Kompas, 26 Agustus 2009.

¹⁴ Kebijakan Nasional....., halaman 27 -40.

Untuk dapat menjadi guru PKn yang efektif dalam pendidikan karakter, perlu memahami dengan baik mengenai konsep dan indikator karakter yang hendak dinternalisasikan kepada peserta didik. Tanpa pemahaman yang baik mengenai nilai karakter tersebut, maka sulit bagi guru untuk membuat Silabus, RPP dan melaksanakan praktek pembelajarannya secara efektif.

2. Mengembangkan pembelajaran aktif

Sebuah kegiatan belajar (**task**), baik secara eksplisit atau implisit terbentuk atas enam komponen. Komponen-komponen yang dimaksud adalah: Tujuan, Input, Aktivitas, Pengaturan (*Setting*), Peran guru, Peran peserta didik.¹⁵

Komponen-komponen tersebut dapat **mengembangkan karakter peserta didik** apabila memenuhi prinsip-prinsip atau kriteria berikut.

a. Tujuan

Dalam hal tujuan, kegiatan belajar yang menanamkan nilai adalah apabila tujuan kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga sikap. Oleh karenanya, guru perlu menambah orientasi tujuan setiap atau sejumlah kegiatan belajar dengan pencapaian sikap atau nilai tertentu, misalnya kejujuran, rasa percaya diri, kerja keras, saling menghargai, dan sebagainya.

b. Input

Input dapat didefinisikan sebagai bahan/rujukan sebagai titik tolak dilaksanakannya aktivitas belajar oleh peserta didik. Input tersebut dapat berupa teks lisan maupun tertulis, grafik, diagram, gambar, model, charta, benda sesungguhnya, film, dan sebagainya. **Input yang dapat memperkenalkan nilai-nilai adalah yang tidak hanya menyajikan materi/pengetahuan, tetapi yang juga menguraikan nilai-nilai yang terkait dengan materi/pengetahuan tersebut.**

c. Aktivitas

Aktivitas belajar adalah apa yang dilakukan oleh peserta didik (**bersama dan/atau tanpa guru**) dengan **input belajar** untuk mencapai tujuan belajar. Aktivitas belajar yang dapat membantu peserta didik menginternalisasi nilai-nilai adalah aktivitas-aktivitas belajar aktif yang antara lain mendorong terjadinya *autonomous learning* dan bersifat *learner-centered*. Pembelajaran yang memfasilitasi *autonomous learning* dan berpusat pada siswa secara otomatis akan membantu siswa memperoleh banyak nilai. Contoh-contoh aktivitas belajar yang memiliki sifat-sifat demikian antara lain diskusi, eksperimen, pengamatan/observasi, debat, presentasi oleh siswa, dan mengerjakan proyek.

d. Pengaturan (*Setting*)

Pengaturan (*setting*) pembelajaran berkaitan dengan kapan dan di mana kegiatan dilaksanakan, berapa lama, apakah secara individu, berpasangan, atau dalam kelompok. Masing-masing *setting* berimplikasi terhadap nilai-nilai yang terdidik. *Setting* waktu penyelesaian tugas yang pendek (sedikit), misalnya akan menjadikan peserta didik terbiasa kerja dengan cepat sehingga menghargai waktu dengan baik. Sementara itu kerja kelompok dapat menjadikan siswa memperoleh kemampuan bekerjasama, saling menghargai, dan lain-lain.

e. Peran guru

¹⁵Draf Panduan Guru Mata pelajaran PKn, halaman 15

Peran guru yang memfasilitasi diinternalisasinya nilai-nilai oleh siswa antara lain guru sebagai fasilitator, motivator, partisipan, dan pemberi umpan balik. Mengutip ajaran Ki Hajar Dewantara, guru yang dengan efektif dan efisien mengembangkan karakter siswa adalah mereka yang *ing ngarsa sung tuladha* (di depan guru berperan sebagai teladan/memberi contoh), *ing madya mangun karsa* (di tengah-tengah peserta didik guru membangun prakarsa dan bekerja sama dengan mereka), *tut wuri handayani* (di belakang guru memberi daya semangat dan dorongan bagi peserta didik).

f. Peran peserta didik

Agar peserta didik terfasilitasi dalam mengenal, menjadi peduli, dan menginternalisasi karakter, peserta didik harus diberi peran aktif dalam pembelajaran. Peran-peran tersebut antara lain sebagai partisipan diskusi, pelaku eksperimen, penyaji hasil-hasil diskusi dan eksperimen, pelaksana proyek, dsb.

Pembelajaran aktif dalam PKn dalam upaya untuk **mengembangkan karakter** berdasarkan kajian standar isi (SI) antara lain dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:¹⁶

- a. Mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku teks, surat kabar, majalah, tokoh masyarakat. Karakter yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran ini antara lain : kereligiusan, kejujuran, kemandirian, kerja keras, kedisiplinan, keingintahuan, cinta ilmu.
- b. Membaca dan menelaah (studi pustaka). Karakter yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran ini antara lain: kereligiusan, keingintahuan, cinta ilmu.
- c. Mendiskusikan. Karakter yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran ini antara lain: kereligiusan, kecerdasan, demokratis, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif; kesantunan, menghargai keberagaman Kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain.
- d. Mempresentasikan. Karakter yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran ini antara lain: percaya diri, kemandirian, tanggung jawab, demokratis, kesantunan, kejujuran.
- e. Memberi tanggapan. Karakter yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran ini antara lain: kereligiusan, kecerdasan, ketangguhan, demokratis menghargai keberagaman, kejujuran, menghargai keberagaman, kemandirian Kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain.
- f. Memecahkan masalah atau kasus. Karakter yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran ini antara lain: kereligiusan, kecerdasan, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, kepatuhan pada aturan-aturan sosial, ketangguhan, nasionalisme, kemandirian, Kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain kepedulian.
- g. Mengamati/mengobservasi. Karakter yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran ini antara lain: kerja keras, keingintahuan, kesantunan, kemandirian, kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain menghargai keberagaman, kejujuran.
- h. Mensimulasikan. Karakter yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran ini antara lain : demokratis, kejujuran, nasionalisme, kepedulian, ketangguhan, kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain menghargai keberagaman, kepatuhan pada aturan-aturan sosial,

¹⁶ Draf Panduan Guru Mata pelajaran PKn, halaman 19

- i. Mendemonstrasikan. Karakter yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran ini antara lain nasionalisme, kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, kedemokrasian, kejujuran, menghargai keberagaman.
- j. Memberikan contoh. Karakter yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran ini antara lain: nasionalisme, kedemokrasian, kejujuran, menghargai keberagaman, kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain
- k. Mempraktikan/menerapkan : Karakter yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran ini antara lain: kedemokrasian, nasionalisme, kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, kepatuhan pada aturan-aturan sosial, menghargai keberagaman.

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran aktif melalui proses dari tahapan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik mempraktikkan nilai-nilai karakter yang ditargetkan. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi¹⁷. Prinsip-prinsip *Contextual Teaching and Learning* (konstruktivisme, bertanya ; masyarakat belajar; menemukan ; pemodelan ; refleksi ; dan penilaian yang sebenarnya) disarankan diaplikasikan pada semua tahapan pembelajaran karena prinsip-prinsip pembelajaran tersebut dapat memfasilitasi terinternalisasinya nilai-nilai. Selain itu, perilaku guru sepanjang proses pembelajaran harus merupakan model pelaksanaan nilai-nilai bagi peserta didik. Diagram 1. berikut menggambarkan penanaman karakter melalui pelaksanaan pembelajaran.

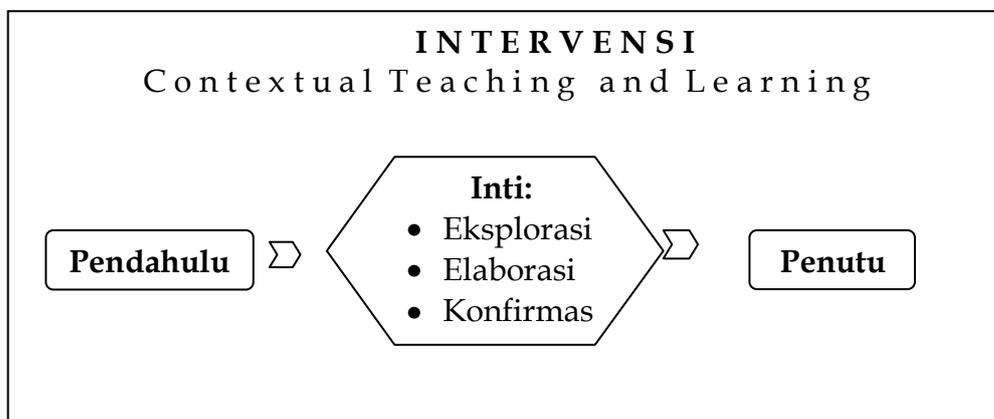


Diagram 1: Penanaman Karakter melalui Pelaksanaan Pembelajaran

Pembelajaran aktif dalam PKn pada dasarnya menerapkan pendekatan CTL dan aktivitas pembelajaran yang mencakup kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Dalam langkah – langkah kegiatan pembelajaran dapat dicontohkan sebagai berikut.

PENDAHULUAN

1. Kesiapan kelas dalam pembelajaran (salah seorang diminta untuk memimpin

¹⁷ Permendiknas RI Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah .

<p>berdo'a, absensi, kebersihan kelas, menyanyikan salah satu lagu wajib, salah satu peserta didik memimpin mendoakan temannya yang tidak hadir karena sakit dll).(karakter religius)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari (karakter rasa ingin tahu) 3. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. 4. Meyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
<p>KEGIATAN INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Peserta didik mengamati, menggali informasi tentang fakta, konsep dan membuat catatan dari berbagai sumber seperti buku BSE, surat kabar, internet, dan sumber yang lain (eksplorasi); 2.Peserta didik memdalam dengan diskusi, pemecahan masalah, mempresentasikan dan memberi tanggapan, dsb (elaborasi) 3.Peserta didik melakukan refleksi dan bertanya dan guru melakukan berbagai penjelasan yang terkait dengan kegiatan eksplorasi dan elaborasi baik terkait dengan penguasaan kompetensi, konsep, karakter , maupun menjawab pertanyaan, dsb (konfirmasi) <p style="text-align: center;">Guru melakukan penilaian proses.</p>
<p>PENUTUP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik dengan dibimbing dan difasilitasi guru membuat kesimpulan dan refleksi 2. Peserta didik mencatat tugas-tugas kegiatan yang diberikan guru dan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya 3. Salah satu peserta didik memimpin do,a untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran (karakter religius).

3.Mengembangkan kultur Sekolah

Kultur sekolah yang kondusif bagi pengembangan karakter perlu diciptakan. Kultur sekolah adalah norma-norma, nilai-nilai, keyakinan, sikap, harapan-harapan, dan tradisi yang ada di sekolah dan telah diwariskan antar generasi, dipegang bersama yang mempengaruhi pola pikir, sikap dan pola tindakan seluruh warga. Pembelajaran yang baik hanya dapat berlangsung pada sekolah yang memiliki kultur positif. Suatu kultur sekolah yang sehat akan berdampak kesuksesan siswa dan guru dibandingkan dengan dampak bentuk reformasi pendidikan yang lain.¹⁸ Kultur sekolah yang sehat dan positif berkaitan erat dengan: motivasi dan prestasi siswa dan produktivitas dan kepuasan guru. Racun kultur negatif di sekolah misalnya: diktator, komentator, agitator, dan spectator.

Tabel 7. Kultur Sekolah

KULTUR SEKOLAH YANG POSITIF	KULTUR SEKOLAH NEGATIF
1. Memiliki keyakinan hanya mereka belajar keras dan sungguh-sungguh yang akan	1. Memiliki keyakinan asal belajar meski apa adanya pasti lulus

¹⁸ Zamroni, 2009. Pembelajaran IPS Dan Kultur Baru Sekolah, Disampaikan dalam Kegiatan Refreshing Dosen FISE UNY.

<p>memperoleh prestasi tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memegang teguh nilai prestasi dan proses mencapainya merupakan dua sisi dari mata uang 3. Membangun jembatan antara visi, misi dan aksi 4. Memiliki simbol-simbol yang menekankan penghargaan dan sanksi, sehingga mendorong pencapaian eksekusi dan menghambat pelanggaran & tidak memiliki prestasi rendah 5. Lingkungan sekolah bersih, rapi, sejuk dan aman. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memiliki nilai prestasi harus setinggi mungkin, dengan segala cara untuk mencapainya 3. Kebijakan kepala sekolah bersifat pilih kasih 4. Visi, misi dan program sekolah tidak disosialisasikan dengan benar kepada seluruh stake holder 5. Diantara warga sekolah tidak ada saling percaya mempercayai 6. Mereka yang inovatif malah dikritik, tidak disenangi 7. Hasil karya siswa dan prestasi sekolah yang hebat tidak dipajang sebagaimana mestinya 8. Sampah berserakan dimana-mana di lingkungan sekolah 9. Banyak siswa dan guru terlambat datang ke sekolah
--	---

Diolah : Dari Zamroni, 2009. Pembelajaran IPS Dan Kultur Baru Sekolah.

4. Menjadi model

Guru hendaknya dapat menjadi contoh bagi peserta didik sebagai guru yang berkarakter. Maksudnya sikap dan tindakan guru menggambarkan karakter yang diinternalisasikan kepada peserta didik. Dengan kata lain seperti peran guru yang diajarkan Ki Hajar Dewantara, bahwa guru yang dengan efektif dan efisien mengembangkan karakter siswa adalah mereka yang *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*. Dalam hal ini Bung Karno menyatakan semboyan: “orang tidak dapat mengajarkan apa yang dikehendaknya, tidak juga apa yang diketahuinya, orang hanya dapat mengajarkan apa yang dihayatinya”. Pendapat Bung Karno mempertegas bahwa seorang guru tidak ada pilihan lain kecuali mempraktekan apa yang diajarkannya, untuk dapat menghayati yang diajarkannya.

Guru PKn maupun anak didik kita dapat banyak belajar maupun mencontoh mutiara-mutiara karakter dari para pendiri bangsa. Misalnya, salah satunya adalah Bung Hatta. Bung Hatta memiliki karakter antara lain: bebas; tekun; santun; saleh; patriotik; aktif berorganisasi. Para founding father juga merupakan guru bangsa yang memiliki karakter yaitu memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang berbagai hal (*well informed*), pembaca yang baik (*well read*), berkemampuan yang sangat baik untuk mengemukakan pendapatnya dengan lisan maupun tulisan (*well equipped*), serta pengetahuan dan ilmu yang dimilikinya sebagai basis gerakan sosial.

BACAAN:

- Center for Civic Education (1994). *National Standard for Civics and Government*, Calabasas: California.
- Draf Panduan Guru Mata pelajaran PKn : Pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan Nasional, 2010.
- Gumilar Rusliwa Somantri,2006. Pancasila dalam Perubahan Sosial-Politik Indonesia Modern, *dalam Restorasi Pancasila : Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Prosiding Simposium Peringatan Hari Lahirnya Pancasila, Kampus FISIP UI, Depok 31 Mei 2006, halaman 1-34.
- Hendri Saparini, 2011. Si Miskin Harus Bekerja, Kompas, 10 Januari 2011
- John Potter “The challenge of education for active citizenship”, *Education + Training*, Volume 44- Number 2 -2002- p. 57 – 66 :
- Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010 – 2025*, Pemerintah Republik Indonesia 2010,
- “Pendidikan Tanpa Revolusi Bisa Terpuruk, Kompas, 26 Agustus 2009.
- Permendiknas RI Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah .
- Revrisond Baswir.2009, Ekonomi Kerakyatan Vs Neoliberalisme Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM
- Rikard Bagun.2002. *Seratus Tahun Bung Hatta*. Jakarta : Buku Kompas.
- Susan Hunter & Rivhard A Birisbin Jr. ,2001.,Departemen of Political Science West Virginia University, “Civic and Political Education in Political Science A Survey of Practices”, Prepared for presentation at the Annual Meeting of APSA , Boston, MA.
- Tim Direktorat Dikdasmen, 2006, Pendidikan Kewarganegaraan:Bahan Sosialisasi Dalam Pelaksanaan Kurikulum Satuan Pendidikan. Jakarta : Tim Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- Tim Pendidikan Karakter .2010. Pendidikan Karakter Di SMP Kementerian Pendidikan Nasional
- Zamroni, 2009. Pembelajaran IPS Dan Kultur Baru Sekolah, Disampaikan dalam Kegiatan Refreshing Dosen FISE UNY.